

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara berkembang memiliki potensi untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Indonesia termasuk negara berkembang yang terus membangun di berbagai aspek tetapi memiliki persoalan keterbatasan dan kendala akan sumber pendanaan dari dalam negeri.

Pembangunan ekonomi merupakan prasyarat mutlak bagi negara-negara berkembang atau sering disebut negeri dunia ketiga termasuk Indonesia, untuk mengejar keteringgalannya dari negara maju banyak hal perlu dilakukan. Akan tetapi agak terkendala kurangnya sumber daya modal yang sebagai salah satu pemicu pembangunan (Atmaja, 2015). Agar memenuhi kekurangan sumber daya modal ini, maka negara pemerintah bersangkutan yang berusaha untuk mendatangkan bantuan sumberdaya modal dari luar negeri melalui ekspor, investasi asing (PMA) dan bantuan luar negeri (peminjaman utang) yang sering digunakan oleh pemerintah. Agar menutupi kekurangan pemerintah dalam memperlancar proses program pembangunan nasional, maka salah satu sumber pendanaan adalah bersumber dari utang luar negeri yang digunakan. Bagi negara-negara berkembang menjadikan utang sebagai alternatif biaya pembangunan tak terkecuali Indonesia (Ramadhani, 2014). Utang luar negeri sering kali muncul ketika

negara-negara berkembang memerlukan dana yang cukup besar untuk membiayai pengeluaran pembangunan.

Pembangunan yang terus menekankan pada proyek-proyek mega infrastruktur dan yang berteknologi tinggi dan membutuhkan dana yang cukup besar, dalam perakteknya justru dibiayai dengan utang luar negeri, telah membawa Indonesia pada model pembiayaan sepenuhnya pada utang luar negeri, sementara disisi lain, sektor – sektor yang diharapkan sebagai sumber penerimaan negara belum mampu menutupi kebutuhan akan dana yang semakin besar dalam membiayai pembangunan.

Anggaran pembangunan (APBN) merupakan gambaran bagaimana pemerintah mengelolah penyelenggaraan negara, dalam praktiknya tidak pernah seimbang hal ini terasa aneh dan kadangkala sering membingungkan. Meskipun tidak ada kesepakatan umum, sebagian pemikir ekonomi menganggap bahwa konsep seimbang yang semu, yang mana defisit dalam anggaran ditutup dengan komponen utang luar negeri (Supriyanto, 1999:23). Sehingga keseringan terus melakukan peminjaman dana yang cukup besar jumlahnya dari lembaga internasional dan negara lain akan terus bergantung dan bukan lagi pelengkap tetapi menjadi sokok guru pembangunan Indonesia.

Tabel 1: Utang Luar Negeri Indonesia (Juta USD) Tahun 2000 2017.

<b>Tahun</b>	<b>Total Utang Luar Negeri (Juta USD)</b>	<b>Utang Luar Negeri Pemerintah (Juta USD)</b>	<b>Utang Luar Negeri Swasta (Juta USD)</b>
2000	141.693	74.916	66.777
2001	133.072	71.377	61.695
2002	131.343	74.661	56.682
2003	135.401	81.666	53.735
2004	137.024	82.725	54.299
2005	130.652	80.184	50.468
2006	128.736	75.820	52.916
2007	136.640	80.165	56.475
2008	155.080	86.600	68.480
2009	172.871	99.265	73.606
2010	202.413	118.624	83.789
2011	225.375	118.642	106.733
2012	252.364	126.119	126.245
2013	266.109	123.584	142.525
2014	293.328	129.736	163.592
2015	310.730	142.608	168.122
2016	316.970	159.722	157.248
2017	352.200	180.600	171.600

Sumber : Bank Indonesia

Kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah hingga saat ini dalam rangka mengurangi utang luar negeri, namun dalam kenyataannya tidak efektif dan masih sulit untuk dikendalikan. Penyebab dari kurangnya efektifnya dalam usaha pengendalian utang luar negeri ini disebabkan oleh banyak faktor yang ditimbulkan dari dalam negeri dan juga berasal dari luar negeri yang sulit diprediksi, termaksud defisit anggaran yang paling besar. Disisi lain termaksud juga banyak faktor-faktor itu yang mampu mempengaruhi utang luar negeri tiap tahunnya. Seperti faktor pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dollar yang sulit diperkuat, inflasi yang bisa saja

tidak stabil karena biaya impor yang selalu naik dan terakhir pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan membutuhkan dana yang cukup untuk menyelesaikan persoalan ekonomi.

Suatu negara melakukan peminjaman ke luar negeri, jika ada gejolak nilai tukar setiap tahunnya maka negara tersebut akan mengalami masalah. Persoalan ini disebabkan karena nilai suatu pinjaman dihitung dengan salah satu valuta asing biasanya dengan dollar Amerika, sedangkan pada pelunasan pinjaman cicilan pokok dan bunga dihitung dengan peminjam mata uang negara tersebut. Misalnya bila nilai tukar rupiah terjadi apresiasi terhadap mata uang dollar AS, maka akan selalu diikuti dengan pengurangan pinjaman kurs nilai mata uang tersebut begitupun sebaliknya bila nilai tukar rupiah depresiasi terhadap mata uang dollar AS, maka akan selalu diikuti dengan penambahan pinjaman kurs nilai mata uang tersebut.

Perubahan pengeluaran karena adanya inflasi. Pada awal tahun penyusunan anggaran belanja negara, didasarkan dan ditetapkan menurut standar harga. Dalam perjalanan tahun anggaran harga standar itu sendiri, ketepatannya tidak dapat dijamin. Artinya, selama tahun anggaran standar berjalan harga itu dapat menurun tapi jarang sedangkan peningkatan itu terus terjadi. Apabila terjadi inflasi, dengan adanya kenaikan harga-harga itu berarti biaya program pembangunan ikut akan meningkat, sehingga ketika ketidakcukupan dana dalam negeri untuk mempercepat pembangunan perlu

adanya penyelesaian salah satunya melalui peminjaman utang ke luar negeri (Puspitaningrum, 2018).

Mempercepat pembangunan untuk percepatan laju pertumbuhan ekonomi diperlukan investasi dan dana cukup besar. Jika dana yang tidak mencukupi dalam negeri, sebagai pilihan salah satu alternatifnya dengan meminjam keluar negeri akhirnya kebutuhan dana tadi menjadi persyaratan untuk pembangunan ekonomi seperti negara Indonesia. Jika kebutuhan itu terus bergantung akan berdampak pada peminjaman utang yang terus bertambah, tetapi ketika pertumbuhan itu naik akan diikuti pendapatan nasional maka akan mengurangi beban utang luar negeri. Sudah seharusnya negara wajib bertanggung jawab dalam menyelesaikan persoalan ekonomi yang diamanahkan dalam konstitusi.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini mengambil rumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh nilai tukar rupiah, inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap utang luar negeri di Indonesia ?

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini Peneliti memiliki batasan masalah agar penelitian lebih terfokus dan terarah, batasan tersebut antara lain:

1. Data dari variabel Independent nilai tukar rupiah, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap variabel Dependent utang luar negeri. Penelitian ini di batasi pada tahun 2000 hingga tahun 2017.

2. Untuk mendapatkan data utang luar negeri rupiah di Indonesia tahun 2000-2017, peneliti berfokus menggunakan data utang luar negeri yang befokus pada utang luar negeri dari pemerintah.

Data yang digunakan diperoleh dari lembaga pengumpul, pengelolah sekaligus pengbulikasian data seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI). Data yang diperoleh dalam rentang waktu 18 tahun terakhir.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yaitu untuk menganalisis pengaruh nilai tukar rupiah, inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap utang luar negeri di Indonesia tahun 2000 - 2017.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang peneliti jelaskan, rumusan masalah dan tujuan masalah diatas maka peneliti dapat memberi masukan saran, informasi dan tambahan pengetahuan yang bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Lembaga Terkait

Dengan adanya penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan dan masukan dalam pertimbangan bagi pemerintah, bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya untuk mengambil kebijakan dapat melihat, mencegah dan mengevaluasi beberapa faktor tersebut bisa mempengaruhi utang luar negeri.

2. Bagi penelitian selanjutnya

Memberi informasi, referensi dan pengetahuan tambahan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian serupa. serta bisa disempurnakan kembali oleh peneliti selanjutnya.

